
Feminisme Liberal Dalam Gerakan Perubahan Sistem Nama Keluarga Berbeda Bagi Pasangan Menikah Di Jepang

Desty Ramadhanty¹⁾, Helen Susanti¹⁾ dan Paramita Winny Hapsari¹⁾

¹⁾Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

^{*)}Surel Korespondensi: paramita@unpak.ac.id

Kronologi naskah

Diterima: 1 Mei 2023; Direvisi: 10 Mei 2023; Disetujui: 22 Mei 2023

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk memahami awal mula terjadinya sistem nama keluarga yang sama di Jepang dan pergerakan feminisme terkait isu nama keluarga di Jepang. dengan menggunakan metode deskripsi analisis dan library research, yaitu dengan cara dilihat dari berbagai sumber yang diperoleh, peneliti akan mengolah kembali data yang telah dikumpulkan, kemudian, dianalisis dan disesuaikan dengan penelitian yang akan dibahas. Penelitian ini menggunakan teori feminisme liberal oleh J.S. Mills dan Harriet Taylor Mills. Dari penelitian ini dapat diketahui terbentuknya sistem nama keluarga yang sama di Jepang dan alasan kebebasan hak sistem nama keluarga berbeda di Jepang harus diperjuangkan.

Kata kunci: fufubessei; nama keluarga; feminisme.

ABSTRACT: This study discusses liberal feminism in the movement to change the surname law for married couples in Japan using descriptive analysis methods and library research, by looking at the various sources obtained, the researcher will reprocess the data that has been collected, then analyze and adapt to the research to be discussed. The research used in this study is liberal feminism by J.S. Mills dan Harriet Taylor Mills. The results of this study, it can be seen that the formation of the same surname system in Japan and the reasons for the freedom of rights of different surname systems in Japan must be fought.

Keywords: *fufubessei; surnames; feminism*

PENDAHULUAN

Jepang adalah salah satu negara maju di dunia yang sampai saat ini masih menjunjung tinggi nilai sejarah dan budaya. Pandangan akan nilai budaya atau tradisi yang telah diwariskan dari zaman dahulu membuat masyarakat Jepang menjadikannya sebagai hukum atau aturan sosial. Salah satu bukti nilai budaya yang telah berubah akibat pengaruh perkembangan serta kemajuan zaman tersebut dapat dilihat dari sistem nama keluarga di masyarakat Jepang. Nama orang Jepang terdiri dari 2 kata yaitu, nama keluarga yang dalam Bahasa Jepang 名字 atau *Myouji* dan nama pemberian yang dalam Bahasa Jepang 下の名前 atau *shita no namae*. Di Jepang memiliki banyak nama keluarga dan aturan bahwa setiap keluarga memiliki nama keluarga yang sama.

Dilihat dari sisi historisnya, aturan sistem nama keluarga mulai diberlakukan pada zaman restorasi Meiji, di mana terdapat sistem koseki, yang berarti sistem registrasi keluarga di mana masyarakat Jepang wajib mendaftarkan anggota keluarga dengan nama keluarga yang sama secara administratif guna mempermudah pengumpulan pajak dan mengatur pendaftaran militer. Menurut Sumiko Hoshino, sistem koseki terus-menerus melakukan perbaikan dan diberlakukan bersama dengan KUH Perdata sehingga menetapkan larangan pendaftaran tiga generasi, hanya terbatas pada anggota keluarga, yaitu orang tua dan anak-anak yang memiliki nama keluarga yang sama.

Keharusan pemakaian satu nama keluarga (*surname*) yang sama bagi pasangan yang sudah menikah menjadi perhatian masyarakat di Jepang. Walaupun beberapa nama keluarga dapat diambil dari pihak suami atau istri, dalam kenyataannya sekitar 96 persen pasangan menikah di Jepang menggunakan nama dari pihak suami. Jika ada suami yang nama belakangnya diambil dari pihak istri, biasanya ini terjadi karena diminta oleh keluarga si istri, yakni untuk dapat meneruskan nama keluarga mereka akibat ketiadaan anak laki-laki dari pihak keluarga si istri (*The Jakarta Post*, 2015).

Pada zaman modern ini gerakan mempertahankan nama keluarga perempuan setelah menikah (*fufubessei*) telah menguat di tengah tren sosial baru, yang ditandai dengan beragam nilai dan pandangan tentang keluarga. Perdebatan nama keluarga dirasa

melambangkan kekakuan masyarakat Jepang untuk berbagi dan menghormati nilai-nilai yang berbeda. Namun, pada kenyataannya, nama keluarga yang sama yang menjadi permasalahan tampaknya didukung, dan ada banyak penolakan dari pihak pemerintah untuk meninjau sistem sosial yang mapan.

Secara garis besar perubahan nama keluarga dirasa banyak merugikan perempuan dan menginginkan untuk merevisi undang-undang yang berlaku, hal berkaitan erat dengan feminisme yang bertujuan memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta kebebasan dan hak-hak individu.

Dapat diketahui bahwa kedatangan feminisme yang memberikan kemajuan pola pikir dalam kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Namun, kemajuan juga diiringi oleh risiko yang akan terjadi. Pola pikir feminisme mendatangkan risiko perubahan nilai kultur dan sosial dari sistem nama keluarga yang sama diterapkan oleh sebagian besar masyarakat Jepang, namun di sisi lain feminisme memberikan perubahan terhadap peranan kaum perempuan Jepang dan menyelamatkan mereka dari isu-isu diskriminasi pada wanita.

Hukum Jepang mengharuskan pasangan untuk memilih salah satu dari nama keluarga pasangan saat menikah, dan sebagian besar nama keluarga pria dipilih saat menikah. Peraturan hukum ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi perempuan yang ingin menikah dan mempertahankan nama keluarga untuk karier atau identitasnya. Untuk memahami ketegangan antara sistem keluarga tradisional Jepang yang ditekankan dalam KUH Perdata Meiji sebelumnya dan kesetaraan gender yang ditekankan dalam hukum Jepang saat ini, penelitian ini mengeksplorasi sistem nama keluarga di Jepang dengan meninjau masalah sosial dan survei terbaru. Secara khusus, penelitian ini meneliti gerakan memperjuangkan nama keluarga yang berbeda di Jepang yang dikaji menggunakan teori feminisme liberal.

LANDASAN TEORI

Istilah feminisme diambil dari kata latin 'famina' yang berarti memiliki sifat keperempuanan (Hubies 1977:19). Feminisme, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah gerakan perempuan yang menginginkan

persamaan hak secara penuh antara laki-laki dan perempuan. Menurut Farha (2000: 69), feminisme didefinisikan sebagai pengakuan atas penindasan perempuan di rumah, di tempat kerja, dan di masyarakat. Akibatnya, baik laki-laki maupun perempuan dapat dikategorikan sebagai feminis jika menyadari adanya interaksi sosial yang tidak setara yang merugikan salah satu pihak dan berupaya untuk memberantasnya.

Secara umum, pandangan-pandangan feminisme yang dibangun oleh para pemikir feminis memiliki perspektif dan teori yang berbeda-beda. Salah satu aliran dari feminisme, yaitu Feminisme Liberal. Menurut Humm dalam (Kartika, 2014) feminisme liberal adalah sebuah gerakan yang terlihat dalam upaya setiap perempuan untuk merdeka. Berdasarkan interpretasinya terhadap ideologi liberal, yang menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama. Tujuan keseluruhan feminisme liberal untuk menciptakan masyarakat yang adil dan meningkatkan kesadaran akan kemandirian setiap individu. Seorang wanita harus berusaha keras untuk mengubah sistem, struktur, dan pola pikir yang ada untuk mencapai tujuannya (Tong, 2009). Feminis liberal menekankan hak dan peluang individu untuk menemukan dan menyarankan bahwa perubahan dalam peraturan hukum dan sosial akan membantu perempuan melakukannya. (Hannam, 2007).

Feminisme liberal dibentuk pada abad ke-18 oleh Mary Wollstonecraft dalam karyanya *A Vindication of the Right of Women*, yang mengkritik disparitas pendidikan laki-laki dan perempuan, dengan alasan bahwa mendidik perempuan sama dengan mendidik laki-laki dengan mengajar perempuan berupa rasionalitas, yang memungkinkan wanita menjadi wanita yang mandiri daripada "mainan pria". Pada abad ke-19, John Stuart Mill dalam bukunya *Subjection of Women*, dan Harriet Taylor Mills dalam bukunya *Enfranchisement of Women* JS Mill dan Harriet Taylor Mill berpendapat untuk mencapai kesetaraan gender tidak hanya didukung akses yang sama ke pendidikan tetapi juga kesempatan untuk berpartisipasi dalam ekonomi dan perlindungan hak-hak sipil seperti hak untuk berorganisasi, kebebasan berekspresi, hak untuk memilih, dan hak pribadi.

Mill menambah pandangannya mengenai hak-hak perempuan, di mana ia menerapkan

ide-ide inti kepercayaan liberal. Pertama, ia mengklaim bahwa masalah inti perempuan adalah bahwa mereka tidak diberi hak untuk membuat keputusan yang bebas dan masuk akal tentang hidup mereka. Mereka hanya dapat 'memilih' kehidupan perbudakan dalam pernikahan daripada kehidupan 'kebebasan rasional', yang merupakan landasan identitas liberal. Kedua, Mill mengklaim bahwa otonomi individu ditolak bagi perempuan. Seorang wanita hanya bisa bebas jika dia mandiri, dan untuk dikatakan mandiri dia harus bekerja. Wanita dirampas kemerdekaannya ketika dia menikah dan juga menolak komponen penting yaitu kesetaraan. Wanita akan bebas hanya ketika pria dan wanita memiliki kesetaraan yang sempurna dalam hubungan mereka, menurut kode liberal (Mill, 1971).

Setelah menetapkan bahwa perempuan telah ditolak kebebasan, otonomi, dan kesetaraan yang menjadi hak mereka, Mill melanjutkan terlepas dari kemajuan peradaban hal ini terjadi karena posisi perempuan tidak bertumpu pada analisis yang beralasan atas situasi mereka, tetapi lebih pada tradisi dan penggunaan kekuatan. Ketundukan perempuan ada karena 'tidak ada cara lain yang dicoba'. Dominasi mereka, lebih jauh, tidak memiliki sumber hukum lain selain hukum yang terkuat (Mill, 1971).

HASIL PENELITIAN

FufuBessei

夫婦別姓 (*Fufu-bessei*) mengacu pada pasangan menikah dengan nama keluarga yang berbeda. Hal ini bertentangan dengan sistem saat ini yaitu *fufudossei* (nama keluarga yang sama) yang diterapkan dalam koseki di Jepang, ketika orang menikah di Jepang mereka harus memiliki nama belakang yang sama, kecuali jika itu adalah pernikahan internasional (pernikahan antara warga negara Jepang dan warga negara asing). Sebagian besar istri 'mengubah' atau mengganti nama mereka dengan nama suaminya. Sedangkan anak dari pasangan suami istri harus mengadopsi nama keluarga yang telah ditetapkan oleh pasangan tersebut sebagai nama keluarga. Disebabkan oleh dari hal itu, beberapa orang menuntut revisi undang-undang perkawinan untuk mengizinkan *fufubessei*, yang akan memungkinkan pasangan untuk

mempertahankan nama keluarga masing-masing jika mereka menginginkannya.

Hukum Nama Keluarga Bagi Pasangan Menikah

Hubungan antara KUHPerduta 750 (aturan nama yang sama), dokumen koseki, dan gagasan atau ideologi keluarga dibuat eksplisit dalam formulir pemberitahuan pernikahan yang diperlukan untuk menikah secara sah. Sebagian besar aktivis yang mengkritik koseki yang mencantumkan aturan nama yang sama dari KUHPerduta 750 yang merupakan pilar utama dari struktur koseki. Pasal 750 Konstitusi Jepang 日本国憲法 berdasarkan 1898 KUHPerduta Meiji, yang mensyaratkan bahwa setelah menikah pasangan harus menggunakan nama keluarga tunggal:

「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称することとされる（夫婦同氏制）。」

※ 改正民法は、旧民法以来の夫婦同氏制の原則を維持しつつ、男女平等の理念に沿って、夫婦は、その合意により、夫又は妻のいずれかの氏を称することができるとした。

Fūfu wa, kon'in no sai ni sadameru tokoro ni shitagai, otto matawa tsuma no uji o shōsuru.

※ *Kaisei minpō wa, kyū minpō irai no fūfu dōshi-sei no gensoku o iji shitsutsu, danjo byōdō no rinen ni sotte, fūfu wa, sono gōi ni yori, otto matawa tsuma no izureka no uji o shōsuru koto ga dekiru to shita.*

Sepasang suami istri harus mengacu pada suami atau istri sebagaimana ditentukan pada saat perkawinan (sistem suami-istri).

※ KUHPerduta yang direvisi mempertahankan prinsip sistem suami istri sejak KUH Perdata lama, dan sejalan dengan gagasan kesetaraan gender, pasangan dapat menyebutkan nama suami atau istri dengan kesepakatan.

Pasal tersebut berarti bahwa baik suami atau istri harus mengganti nama mereka. Aktivis yang memperjuangkan nama keluarga yang berbeda telah berusaha untuk melakukan transformasi Pasal 750 sekitar awal 1990

sehingga akan lebih mudah bagi para wanita yang ingin mempertahankan nama gadis mereka dalam pernikahan untuk melakukannya. Praktek umum dan norma-norma hegemonik mengarah pada harapan bahwa seorang wanita akan dengan mengambil nama suaminya pada pernikahan kecuali ada keadaan yang tidak biasa. (White, 2018)

Aturan sistem nama keluarga mulai diberlakukan pada zaman Meiji, di mana terdapat sistem koseki, yang berarti sistem registrasi keluarga. Peran yang mendasari koseki adalah untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menentukan populasi Jepang. Pada dasarnya adalah sistem pencatatan sipil yang mencatat dan mendokumentasikan status sipil individu berdasarkan unit rumah tangga dan merupakan mekanisme negara definitif untuk menentukan identitas hukum seseorang sebagai orang Jepang. Koseki menempatkan individu dalam sebuah keluarga dan dalam hubungan keluarga.

Registrasi ini mencatat data rumah tangga menurut kelas sosial berdasarkan pekerjaan dan tempat tinggal. Termasuk juga rincian kematian, kelahiran, pernikahan, dan hubungan dan peristiwa penting keluarga lainnya. Banyak alasan mengapa pemerintah mengidentifikasi dan mendokumentasikan suatu populasi melalui koseki. Misalnya, pihak berwenang memerlukan sistem yang terorganisir untuk pengumpulan pajak, manajemen wajib militer, pelacakan subjek/warga negara (pengawasan) dan perbedaan antara mereka yang termasuk warga negara dan mereka yang bukan warga negara tersebut.

Sistem ini dihapuskan setelah Perang Dunia Kedua dengan revisi KUH Perdata pada bulan Desember 1947, dengan ini sistem koseki dari Era Meiji juga direformasi. Koseki era Meiji ditulis tangan secara vertikal dari kanan ke kiri dalam gaya Jepang. Koseki saat ini dicetak dengan gaya barat, diketik secara horizontal pada formulir yang dibaca dari kiri ke kanan. Kemudian, koseki era Meiji mengurutkan semua anggota sesuai urutan

masuknya mereka ke dalam keluarga. Seorang putra tertua sudah terdaftar di koseki orang tua atau kakek-neneknya. Istrinya yang menikah terdaftar di akhir koseki sebagai kedatangan terbaru. Hal ini berubah dengan pemerintah memutuskan untuk menjadikan keluarga suami istri sebagai dasar pendaftaran koseki. Menekankan pada pernikahan, koseki sekarang didasarkan pada unit yang terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anak mereka di mana semua anggota keluarga memiliki nama keluarga yang sama. Di bawah unit dua generasi baru ini, anak-anak dihapus dari koseki orang tua mereka setelah mereka menikah dan koseki baru disiapkan untuk mereka.

Saat ini ketika seorang wanita mengubah namanya setelah menikah di Jepang dan pindah ke koseki yang terdaftar atas nama suaminya menggunakan koseki perkawinan baru yang mencantumkan alamat honseki dan kolom tsuzukigara yaitu, bagian dari dokumen koseki yang mengurutkan semua orang berdasarkan urutan kelahiran dan jenis kelamin. Persyaratan bahwa setiap unit keluarga hanya memiliki satu nama keluarga, yang umumnya mempertahankan garis keturunan keluarga dan menonaktifkan nama keluarga dan silsilah istri, dan berbagai cara di mana legitimasi anak dibatasi di koseki.

Gerakan Pendukung Fufubessei

Gerakan fufubessei, gerakan yang menyerukan reformasi hukum untuk mengizinkan suami dan istri mempertahankan nama keluarga mereka sendiri, berawal dari gerakan pembebasan perempuan di Jepang. Salah satu asosiasi pembentuk paling awal, Fufubessei Sentakusei o Susumeru Kai (Asosiasi Mempromosikan Memilih Nama Keluarga Terpisah), dibentuk pada tahun 1984. Hal ini diikuti oleh banyak asosiasi serupa tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di berbagai daerah terpencil. Keanggotaan sebagian besar terdiri dari advokat wanita, tetapi ada juga advokat pria sesekali (Fufubessei Sentakusei o Susumeru Kai; Shin, 2004; Yamanoue, 1994). Banyak dari

kelompok-kelompok ini mengadakan pertemuan rutin, menerbitkan buletin, berbagi informasi dan bertindak dalam solidaritas dengan asosiasi lain. Beberapa kelompok juga aktif memberikan dukungan bagi penggugat dalam tuntutan hukum terkait dan dalam melobi reformasi sistem perkawinan (Shin, 2004).

Meskipun anggota fufubessei mengalami penurunan keanggotaan asosiasi dengan pergeseran generasi, ada juga perpecahan ideologis dalam gerakan tersebut, yang tidak dapat dihindari mengingat keragaman pengalaman hidup. Pada tahun 2016, seorang wanita yang berpikiran sama mendirikan sebuah kelompok bernama Jikka no Namae o Keisho Shitai Shimai no Kai (Asosiasi Suster untuk Melanjutkan Nama Keluarga). Asosiasi ini menyatukan suara wanita yang ingin melanjutkan nama keluarga kelahiran mereka, dan mengajukan banding ke anggota parlemen di Partai Demokrat Liberal, partai konservatif terkemuka.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengguna media sosial (SNS) telah berkembang, kelompok telah terbentuk secara spontan. Seperti contohnya, sebuah gerakan dari kelompok sukarelawan yang bernama 選択的夫婦別姓・全国陳情アクション Sentakuteki Fufu Bessei Zenkoku Chinjo Action (Petisi Nasional Aksi Optional Nama Keluarga yang Berbeda). Situs yang dibuka pada akhir November tahun lalu dibuat oleh Direktur Naho Ida seorang praktisi komunikasi Tokyo. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia telah mengumpulkan sekitar lebih dari 60 anggota. Saat ini anggota kelompok sedang mempersiapkan permohonan dan petisi di lebih dari 30 kota di seluruh negeri, sebagian besar di Tokyo.

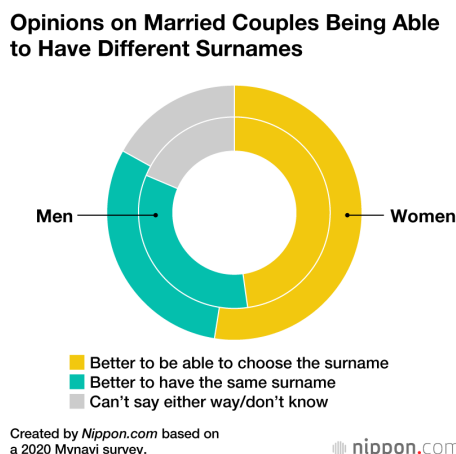
Pada awalnya, gerakan dari Chinjo Action tidak berlatar belakang partai politik atau kelompok parlemen manapun. Sebaliknya, gerakan ini adalah kelompok sukarelawan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan politik. Kemudian pada tahun 2021, gerakan ini menjadi partai yang mengadakan sesi belajar di tujuh partai besar. Misi dari aksi ini adalah untuk meningkatkan jumlah anggota parlemen yang memahami masalah partai politik dan kelompok parlemen yang bekerja untuk mengubah undang-undang.

Bagi banyak masyarakat di Jepang, wanita yang menolak menggunakan nama keluarga suaminya tidak hanya mengganggu keluarga inti, tetapi juga konsep keluarga. Budaya Jepang sendiri tampaknya akan terus melakukan perubahan. Menurut survei baru-baru ini, mayoritas orang setuju bahwa pasangan menikah dengan nama keluarga yang berbeda harus diterima. Dapat kita lihat pada grafik 1 merupakan sebuah survey yang dilakukan oleh studi Waseda, gerakan Naho dan Profesor Universitas Waseda Tanamura Masayuki melakukan survei online tahun lalu.

Menurut data, 70,6 persen dari 7.000 orang yang disurvei percaya bahwa tidak masalah jika pasangan menikah menggunakan nama keluarga yang berbeda. Hanya 14,4 persen orang yang menginginkan semuanya tetap sama. Terlepas dari kenyataan bahwa ini umumnya dianggap sebagai masalah wanita, Tanamura menekankan bahwa itu juga mempengaruhi pria. Menurutnya, 2,4 persen responden pria berusia pertengahan 20-an menyatakan ragu untuk menikah karena tidak setuju jika nama belakang pasangannya berbeda.

Kemudian hasil survei terbaru lainnya pada grafik 2 dilakukan oleh penyedia informasi pekerjaan MyNavi, sekitar setengah dari mahasiswa universitas dan pascasarjana yang akan lulus pada Maret 2022 mendukung sistem yang mengizinkan nama keluarga berbeda setelah menikah.

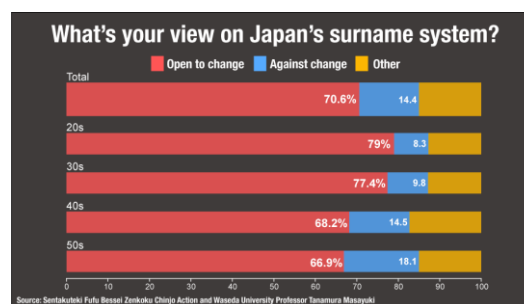
Gambar 2: Survey MyNavi mengenai sistem yang mengizinkan nama keluarga berbeda setelah menikah



Sumber: <https://www.nippon.com/en/japan-data/h00985/>

Survei online dilakukan pada 26 November hingga 23 Desember 2020, dan mendapat 3.938 tanggapan yang valid. Para responden ditanya mengenai pendapat mereka tentang sistem yang memungkinkan mereka untuk memilih nama keluarga yang berbeda, dan hasilnya 33,6% pria muda dan 30,5% wanita muda mengatakan mereka merasa lebih baik memiliki nama keluarga yang sama setelah menikah, seperti yang terjadi saat ini. Namun, 47,8% pria muda dan 52,8% wanita muda menrespon bahwa akan

Gambar 1: Survey survei Waseda, gerakan dari kelompok Naho dan Profesor Tanamura Masayuki dari Universitas Waseda



Sumber: <https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/id/news/backstories/1599/>

lebih baik untuk mendapatkan kesempatan untuk memilih nama keluarga yang sama atau nama keluarga yang berbeda. Selanjutnya 18,6% pria muda dan 16,8% wanita muda mengatakan bahwa mereka tidak dapat menjawab salah satu atau tidak tahu.

Terlepas dari meningkatnya gerakan untuk mempertahankan nama keluarga perempuan setelah menikah, tampaknya ada rentetan argumen yang menentang usulan tersebut di antara para pembuat keputusan, terutama politisi laki-laki senior dari Partai Demokrat Liberal (LDP). Argumen utama mereka adalah bahwa pasangan menikah dan anak-anak mereka yang semuanya memiliki nama keluarga yang sama merupakan elemen alami dan stabil dalam masyarakat, dan bahwa menggunakan nama keluarga yang berbeda akan melemahkan ikatan keluarga, dan akhirnya merusak sistem keluarga.

Keputusan terbaru tentang ketentuan yang telah lama berdasarkan KUH Perdata dan undang-undang pendaftaran keluarga menolak

permintaan yang diajukan oleh tiga pasangan pada tahun 2018 untuk mempertahankan nama keluarga mereka yang terpisah setelah pemerintah daerah menolak untuk menerima pencatatan pernikahan mereka. Keputusan yang dijatuhkan oleh Ketua Hakim Naoto Otani di Grand Bench Mahkamah Agung, yang terdiri dari 15 hakim, datang pada saat bentuk keluarga menjadi lebih beragam dan opini publik tentang pemilihan nama keluarga telah bergeser di Jepang. (Japan Nippon, 2021)

Jepang adalah satu-satunya negara di dunia yang diketahui memiliki undang-undang yang memaksa pasangan menikah untuk berbagi nama keluarga, menurut Kementerian Kehakiman. Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan juga telah merekomendasikan agar Jepang mengubah sistem tersebut. Ketiga pasangan menikah telah mengajukan banding ke Mahkamah Agung setelah Pengadilan Keluarga Tokyo dan cabang Tachikawa menolak permintaan mereka untuk menikah secara sah sambil mempertahankan nama keluarga mereka yang terpisah pada tahun 2019. Pengadilan Tinggi Tokyo menolak banding mereka pada tahun 2020. (Japan Nippon, 2021)

Kebebasan Hak Perempuan Memilih Nama Keluarga Di Jepang

Baru-baru ini, kaum feminis baik di dalam maupun di luar barat terus mengeksplorasi cara-cara menamai diri mereka sendiri. Selain menjadi dasar identitas, proses penamaan terikat dengan tradisi dan harapan sosial dan budaya (Spender, 1980). Meskipun wanita di banyak negara sekarang telah memperoleh hak untuk mempertahankan nama keluarga mereka sendiri ketika mereka menikah, beberapa wanita memilih untuk mengambil hak ini, dan sebagian besar bahkan tidak mempertanyakan nilai atau konsekuensi di baliknya (Fowler & Fuehrer, 1997).

Masalah nama keluarga merupakan masalah yang serius di Jepang. Karena itu, perubahan nama keluarga tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan yang sangat besar yang ditimbulkan oleh perubahan nama. Memperkuat dari berbagai penjelasan akan dijabarkan juga alasan yang terdapat di situs gerakan dari kelompok sukarelawan yang bernama 選択の夫婦別姓・全国陳情アクション *Sentakuteki Fufu Bessei Zenkoku Chinjo Action* (Petisi Nasional Aksi Optional Nama

Keluarga yang Berbeda), terdapat 184 orang mulai dari wanita hingga pria memberikan pendapatnya mengenai alasan mengapa kebebasan memilih nama keluarga pasangan menikah harus direalisasikan, di antara lain:

a) Tanpa memandang jenis kelamin, setiap orang dapat mengubah nama keluarga mereka setelah menikah, sesuai dengan keinginan mereka sendiri, tanpa campur tangan orang tua atau sosial.

Perubahan nama keluarga seseorang berarti mengubah identitas orang tersebut, yang dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Pada dasarnya karena hukum yang berlaku saat ini dan budaya patriarki yang mengakar kuat, lebih banyak wanita yang selalu terikat dalam nama suami.

Hal ini menyebabkan jika perempuan tidak mengikuti kebiasaannya, mereka dapat dengan mudah menjadi sasaran kritikan karena merusak keutuhan keluarga. Sering kali kerabat mereka mengkritik karena antisosial, tidak bermoral, dan egois.

b) Mencerminkan posisi inferior perempuan tidak hanya dalam keluarga tetapi juga dalam masyarakat

Masalah nama keluarga bukan hanya masalah nama, melainkan masalah ketidaksetaraan antara suami dan istri dan antara pria dan wanita. Hak perempuan untuk menjaga nama belakangnya sendiri merupakan tantangan bagi pengakuan keluarga Jepang. Hal ini telah menjadi kontroversi sengit antara feminis, yang percaya bahwa itu adalah isu kunci untuk mewujudkan kesetaraan antara istri dan suami dalam keluarga (Arichi, 1993; Neft & Levine, 1997; Ninomiya, 1993), dan politisi laki-laki yang mendominasi siasat politik dalam rangka melestarikan sistem sosial saat ini yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki dalam kerangka masyarakat Jepang (Nihon Keizai Shimbun, 1997)

c) Semakin meningkatnya jumlah wanita yang menunda pernikahan

Penundaan perkawinan perempuan menunjukkan bahwa mereka akan menikah setelah mereka memantapkan posisi mereka dalam masyarakat sehingga mengubah nama keluarga mereka dapat

memaksa mereka untuk membangun kembali identitas mereka

- d) Sistem nama keluarga akan berdampak kepada anak-anak, terutama keluarga yang berpisah

Pada saat perceraian dan hubungan dengan mantan suaminya (yang cenderung agak negatif), perbedaan nama antara ibu dan anak menjadi perhatian besar. Seorang wanita yang bercerai dapat mempertahankan nama pernikahannya atau melanjutkan nama lamanya setelah perceraian. Bagaimanapun, mereka harus keluar dari koseki perkawinan dan membuat koseki baru. Beberapa wanita yang bercerai memindahkan anak-anak mereka ke koseki baru bersama mereka, tetapi tidak semua, dan hak asuh tidak ditentukan oleh lokasi koseki. Karena semua anggota koseki harus memiliki nama yang sama, jika anak-anak pindah ke koseki ibu yang ditunjuk oleh nama keluarga sebelumnya, mereka semua mengambil nama keluarga sebelum berpindah ke nama keluarganya saat menikah.

Kesatuan nama keluarga dianggap hanya memberikan kepercayaan kepada keluarga yang didefinisikan secara konvensional, terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang memiliki nama keluarga yang sama. Hal ini menolak beragam bentuk keluarga, dan mengabaikan keadaan termasuk perceraian, hidup bersama, dan anak-anak yang lahir di luar nikah. Khususnya, sebagai contoh yaitu kohabitasi; suatu istilah yang ditujukan kepada pasangan yang tinggal satu atap tanpa ikatan perkawinan.

- e) Mengubah nama keluarga mereka saat menikah adalah krisis kehancuran karier

Nama keluarga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, untuk beberapa pekerjaan nama keluarga juga dipakai dalam situasi formal dan pengenalan untuk diri sendiri. Sebagai contohnya, seperti seorang peneliti yang menggunakan namanya untuk berbagai karyanya. Ketika menikah, ia harus mengubah nama keluarganya termasuk di dalam dokumen resmi. Hal itu dianggap krisis kehancuran karier karena reputasi yang telah dibangun harus diubah karena nama yang berubah.

- f) Mengubah nama keluarga membuat banyak kerugian terutama dokumen resmi yang juga diubah.

Mengubah nama keluarga membawa ketidaknyamanan yang sangat besar di Jepang karena semua dokumen resmi harus diubah, seperti: daftar keluarga; paspor; akun bank; surat izin mengemudi; pertanggungjawaban; dan stempel pribadi—yang biasa digunakan sebagai tanda tangan di Jepang. Perempuan cenderung merasa tidak adil karena hanya perempuan yang harus menghadapi prosedur rumit seperti itu.

- **Usaha gerakan pendukung fufubessei dalam memperjuangkan hak kebebasan dalam memilih nama keluarga:**

Dalam penjelasan di atas mengenai kerugian wanita atas perubahan nama keluarga memicu adanya gerakan feminisme liberal kaum perempuan untuk merebut hak kebebasan individu dalam memilih nama keluarga yang mereka inginkan. Dalam teori Mill mengungkapkan masalah yang menjadi akar keterbatasan hak-hak perempuan, yaitu tidak diberi hak untuk membuat keputusan yang bebas dan masuk akal tentang hidup mereka sehingga posisi perempuan lebih bertumpu pada tradisi dan hukum terkuat yang berlaku dan seorang wanita hanya bisa bebas jika dia mandiri. Berikut usaha-usaha yang memperlihatkan bagaimana penggerak fufu bessei untuk memperjuangkan kebebasan, seperti:

1. Menjadi Penggerak Perubahan Sosial

Dalam gerakan fufubessei, mayoritas wanita bergabung untuk menjadi aktivis untuk menyerukan reformasi hukum yang dianggap memaksa mereka untuk mengubah identitas pribadi mereka dan mengharap untuk mengizinkan suami dan istri memiliki kebebasan untuk memilih nama keluarga mereka sendiri. Mill mengungkapkan bahwa hak-hak perempuan dibatasi oleh tradisi dan hukum yang berlaku. Dalam feminisme liberal, seorang wanita harus berusaha keras untuk mengubah sistem, struktur, dan pola pikir yang ada untuk mencapai tujuannya. Dalam gerakan ini adapun usaha yang dilakukan untuk mengubah hukum yang berlaku, seperti:

- 1) Penyebaran informasi mengenai nama keluarga media sosial atau temu langsung
- 2) Pengajuan revisi undang-undang KUH Perdata pasal 750 agar menggerak dewan nasional untuk disampaikan pada Parlemen Jepang.
- 3) Sebagai wadah untuk berbagi pengalaman mengenai nama keluarga dan mengumpulkan suara masyarakat melalui petisi dan mengajak untuk ikut andil dalam mendukung gerakan tersebut
- 4) Mengadakan sesi belajar atau seminar di berbagai tempat.

2. Wanita Bekerja

Mill mengklaim seorang wanita hanya bisa bebas jika dia mandiri, dan untuk mandiri, dia harus bekerja. Wanita akan bebas hanya ketika pria dan wanita memiliki kesetaraan yang sempurna dalam hubungan mereka (Mill, 1971). Penggerak *fufubessei* selain menjadi seorang aktivis, juga ia merupakan seorang pekerja yang juga merasakan kerugian yang sama seperti lainnya. Pertumbuhan pekerjaan perempuan meningkat namun wanita merasa mengalami kendala terkait nama keluarga. Nama keluarga banyak digunakan di depan umum dan keharusan mengubah nama keluarga membuat kesulitan bagi banyak wanita pekerja yang merasa bahwa menya-nyikan kepercayaan dan reputasi baik yang telah dibangun dalam karirnya dengan harus mengadopsi nama baru. Sehingga banyak perempuan yang memilih menggunakan nama keluarganya sebelum menikah di tempat kerja.

SIMPULAN

Isu-isu perempuan selalu melambangkan masyarakat secara keseluruhan dan Jepang tidak terkecuali. Kontroversi seputar masalah nama keluarga sebagian besar mencerminkan posisi wanita Jepang di masyarakat. Kurangnya pilihan perempuan untuk memilih nama keluarga mereka sendiri saat menikah berasal dari konsepsi sistem keluarga tradisional Jepang dan juga berasal dari status perempuan yang lebih rendah baik dalam keluarga maupun dalam dunia kerja.

Pada dasarnya karena hukum KUH Perdata pasal 750 untuk mewajibkan nama keluarga sama bagi pasangan menikah yang berlaku saat ini dan budaya patriarki yang mengakar kuat membuat lebih banyak wanita yang selalu terikat dalam nama suami.

Koseki dipromosikan pemerintah kepada masyarakat untuk pendaftaran keluarga namun mengikat perempuan dalam suatu pernikahan atau masuk ke dalam keluarga suaminya dan ini dianggap sebagai peninggalan dari sistem ie yang diselimuti dengan budaya patriarki yang masih melekat. Hal ini yang menyebabkan gerakan *fufubessei* (sistem nama keluarga yang berberda) menyuarakan undang-undang yang mendefinisikan pernikahan dan keluarga harus direvisi untuk memungkinkan setiap orang memiliki pilihan, tidak menghilangkan identitas pribadi mereka, dan dapat diterima untuk segala bentuk keluarga.

Usaha gerakan *fufubessei* perjuangan sistem nama keluarga yang berhubungan dengan konsep feminisme liberal untuk mewujudkan transformasi sosial dan kesempatan hak-hak perempuan berupa perubahan undang-undang maupun hukum dalam sebuah negara dimana hal tersebut merupakan fokus dalam feminisme aliran liberal. Dengan adanya gerakan *fufubessei* yang masih menguat saat ini seperti *Sentakuteki Fufu Bessei Zenkoku Chinjo Action* membuktikan beberapa masyarakat menyerukan keresahannya terkait sistem nama keluarga. Selain itu usaha yang memperlihatkan penggerak *fufu bessei* antara lain, memperluas informasi, berbagi pengalaman masyarakat mengenai nama keluarga, pengajuan tuntutan hukum untuk reformasi sistem hukum perkawinan terutama sistem nama keluarga.

REFERENSI

- Ara, T. (2021, Juni 25). *Statement Calling to Amend Article 750 of the Civil Code to Introduce a Discretionary Separate-surname Retaining System on the Occasion of the Pronouncement of Ruling by the Supreme Court's Grand Bench*. Retrieved from Japan Federation of Bar Associations: ([https://www.nichibenren.or.jp/en/document/statements/210625.html#:~:text](https://www.nichibenren.or.jp/en/document/statements/210625.html#:~:text=)

=Article%20750%20of%20the%20Civ
il%20Code%20provides%20that%20a
%20husband,they%20are%20going%2
0to%20hold.)

Arichi, M. (1990). Is It Radical? Women Right's
To Keep Their Own Surnames After
Marriage. *Women's Studies
International Forum*, 411-419.

*Sentakuteki Fufu Bessei Zenkoku Chinjyo
Action*. (n.d.). Retrieved from Chinjyo
Action: (<https://chinjyo-action.com/>)

Tong, R. (2009). *Feminist Thought*.
Yogyakarta: Jalasutra.

White, L. (2018). *Gender and the Koseki in
Contemporary Japan Surname, Power,
Privilage*. London: Routledge.